Katalog BPS: 4102002.3306

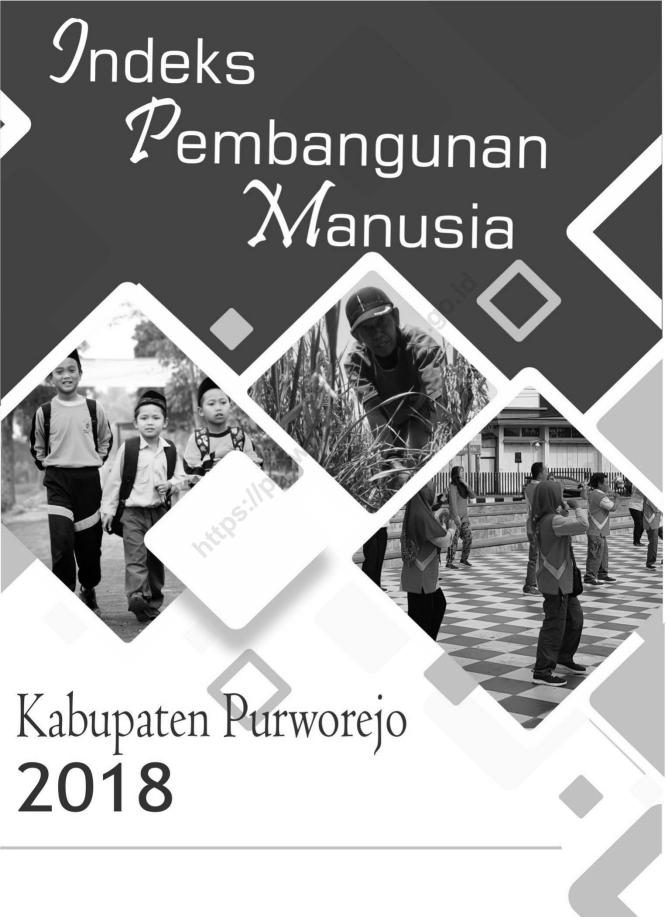




Kabupaten Purworejo

2018





INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO 2018

ISBN : 978-623-92205-0-1

No. Publikasi : 33060.1923 Katalog BPS : 4102002.3306

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm Jumlah Halaman : xi + 40 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Infografis dan ikon diambil dari : www.freepik.com, www.canva.com, www.icons-icons.com

Dicetak oleh : CV Berguna

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab:

R. Bagus Rahmat Susanto, S.Si. PS: III III MOre jokalo li pes do id

Penyunting:

Arif Soesilo, SST

Penulis:

Visita Arsa Pratiwi, SST

Pengolah data:

BPS RI

Pembuat Infografis:

Visita Arsa Pratiwi, SST



KataPengantar

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembangunan manusia Kabupaten Purworejo. Selain itu, dapat juga dilihat capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo dari masing-masing dimensi.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo yang berjudul "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo 2018" ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Purworejo, Oktober 2019 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

R. Bagus Rahmat Susanto, S.Si.





Daftar Isi

		Halaman
Kata Penga	antar	٧
Daftar Isi		vii
Daftar Gar	nbar/Grafik	vii
Daftar Lan	npiran	viii
Bab 1.	Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia	1
	Konsep Dasar Pembangunan Manusia	1
	Pengukuran Pembangunan Manusia	2
Bab 2.	Status Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo	13
Bab 3.	Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo	21
Bab 4.	Kesenjangan Antarwilayah Eks Karesidenan Kedu	27
	Kesenjangan Pembangunan Manusia	27
	Kesenjangan Kesehatan	28
	Kesenjangan Pendidikan	29
	Kesenjangan Pengeluaran per Kapita	31
Kesimpula	п	35
Lampiran		77



Daftar Gambar/Grafik

	Ha	laman
Gambar 1.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	. 2
Gambar 1.2	Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP	. 4
Grafik 2.1	IPM Kabupaten Purworejo dan Komponen, 2018	. 13
Grafik 2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo, 2010-2018	. 14
Grafik 2.3	Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Purworejo, 2010-2018 (Tahun)	
Grafik 2.4	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purworejo, 2010-2018 (Tahun)	
Grafik 2.5	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Purworejo, 2010-2018 (Ribu Rupiah/Tahun)	. 18
Grafik 3.1	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2018	. 21
Grafik 3.2	Angka Harapan Hidup Bayi Saat Lahir Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2018 (Tahun)	. 22
Grafik 3.3.	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah (Tahun)	. 23
Grafik 3.4.	Pengeluaran per Kapita per Tahun Penduduk Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah (Ribu Rupiah)	. 24
Grafik 4.1	Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah, 2010-2018	
Grafik 4.2	Perkembangan Selisih Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/ Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah, 2010-2018	
Grafik 4.3	Perkembangan Selisih Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah, 2010-2018	
Grafik 4.4	Perkembangan Selisih Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah, 2010-2018	
Grafik 4.5	Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah,	. 55
	2010-2018 (Juta Rupiah)	. 31



Daftar Lampiran



		Halaman
Lampiran 1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya	
	Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017-2018	38
Lampiran 2.	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli	
	(PPP)	39
Lampiran 3.	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM	40







BAB 1

Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia

Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia hakikatnya memiliki makna yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Ide dasar ini memiliki fokus kepada manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Namun, hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (*Human Development Report* 1990).

Konsep pembangunan dan pembangunan manusia cukup berbeda. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan pendapatan daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi dan sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, yang dilihat dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pengukuran Pembangunan Manusia

Perjalanan Penghitungan IPM

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Human Development Report 1990 diperkenalkan IPM sebagai indeks komposit yang dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diproksi dengan angka melek umur dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. UNDP memberi bobot untuk kedua indikator dalam dimensi pengetahuan tersebut. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan hinga tahun 2014. Namun akhirnya, pada tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

2010 1990 UNDP merubah Launching: 1995 2014 metodologi: · Komponen IPM · Komponen IPM yang yang digunakan Penyempurnaan: Penyempurnaan: digunakan AHH, RLS, AHH, AMH, PDB Komponen IPM 1. Mengganti tahun dasar PNB per HLS, dan PNB per per kapita yang digunakan Kapita dari 2005 menjadi 2011 Kapita · Metode agregasi AHH, AMH, 2. Merubah metode agregasi Metode agregasi menggunakan Kombinasi APK, indeks pendidikan dari rata-rata menggunakan ratarata-rata dan PDB per geometrik menjadi rata-rata rata geometrik aritmatik kapita aritmatik AHH: Angka Harapan Hidupsaat 1990 1991 1995 2010 2011 2014 AMH: Angka Melek Huruf RLS: Rata-rata Lama Sekolah PDB: Produk Domestik Bruto APK: Angka Partisipasi Kasar 1991 2011 Penyempurnaan: Penyempurnaan: PNB: Produk Nasional Bruto Komponen IPM yang Mengganti tahun dasar digunakan AHH, AMH, RLS, PNB per kapita dari tahun PDB perkapita 2008 menjadi 2005

Gambar 1.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP





Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar Gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari ratarata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Mengapa Metodologi Penghitungan IPM Dirubah?

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Namun, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM setidaknya ada dua hal mendasar.

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik

memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Dengan kata lain, rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi lain yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

Apa Saja Yang Berubah?

UNDP memperkenalkan penghitungan metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Gambar 1.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH) Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak Negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geomatrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata artimatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Bagaimana Dampaknya?

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak.





Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

Pertama, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru tersebut, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain :

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 / SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional / SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Selain sumber utama tersebut, digunakan juga data pendukung seperti inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial ekonomi lainnya. Selain itu, Indonesia juga melakukan penyesuaian terhadap metode baru yaitu pada indikator PNB per kapita karena ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Dalam proses penghitungan IPM dan komponennya, digunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir



AHH yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan AHH melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Micro Computer Program For Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*; yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004 dalam BPS, 2016).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

2. Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

$$RLS = \frac{1}{n}x\sum_{i=1}^{n}x_{i}$$

dimana.

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

 x_i = Lama sekolah penduduk ke-l yang berusia 25 tahun ke atas

n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas karena disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi





pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya O (nol). Variabel yang digunakan dalam penghitungan HLS adalah partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur. Formula yang digunakan untuk menghitung HLS yaitu:

$$EYS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t} \qquad (1)$$

dimana,

 EYS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

 $E_i^t = \mathsf{Jumlah} \; \mathsf{penduduk} \; \mathsf{usia} \; i \mathsf{yang} \; \mathsf{bersekolah} \; \mathsf{pada} \; \mathsf{tahun} \; t$

 P_i^t = Jumlah penduduk usia /pada tahun t

i = Usia (a, a+1, ..., n).

3. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*). Dalam penghitungan standar hidup layak dgunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$PPP_{j} = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}}\right)^{1/m}$$
 (2)

 PPP_i = paritas daya beli di wilayah j

 p_{ik} = harga komoditas /di Jakarta Selatan

 p_{ii} = harga komoditas idi kabikota j

m = jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel Lampiran 2. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel Lampiran 3. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Penyusunan Indeks IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \tag{3}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{make} - HLS_{min}} \tag{4}$$

$$HLS = \frac{HLS}{maks} - HLS_{min}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$
(5)

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \tag{6}$$

$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})}$$
(7)

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel Lampiran 4. Selanjutnya IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari ketiga indeks tersebut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$
 (8)

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan





ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayahwilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

Kelompok "sangat tinggi" : IPM ≥ 80 Kelompok "tinggi" 2. :70 ≤ IPM < 80 Kelompok "sedang" 3. $: 60 \le IPM < 70$ Kelompok "rendah" · IPM < RN

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$r = \left[\frac{IPM_n - IPM_{n-1}}{IPM_{n-1}}\right] \times 100\%$$
engan:
$$= \frac{1}{1} \frac{1$$

Keterangan:

= Pertumbuhan IPM IPM_n = IPM tahun ke-n = IPM tahun ke-(n-1) IPM_{n-1}



Tahun 2018, IPM Purworejo 71,87

Pengeluaran/Kapita/Tahun
10,05 Juta

Angka Harapan Hidup
74,40
Tahun



Semua dimensi mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA 2018



IPM Purworejo Peringkat ke-14 se-Jawa Tengah

Rata-rata Lama Sekolah
7, 70
Tahun

03

Harapan Lama Sekolah
13,48
Tahun





BAB 2

Status Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo

Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo sebesar 71,87. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Pada waktu tersebut, angka harapan hidup di Kabupaten Purworejo mencapai 74,40 tahun. Artinya, harapan hidup bayi yang baru lahir di Kabupaten Purworejo dapat bertahan hidup secara rata-rata hingga usia 74,40 tahun. Dimensi kedua sebagai pembentuk IPM adalah pengetahuan. Dimensi ini diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Di tahun 2018, angka harapan lama sekolah Kabupaten Purworejo mecapai 13,48 tahun. Rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas yang bersekolah diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga 13,48 tahun. Bila disamakan dengan ratarata usia sekolah, penduduk Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di tahun yang sama tercatat 7,70 tahun. Hal ini berarti, penduduk Kabupaten Purworejo usia 25 tahun ke atas telah menempuh jenjang pendidikan selama 7,70 tahun masa sekolah atau setara telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Dimensi terakhir untuk perhitungan IPM adalah standar hidup layak. Dimensi ini diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan di tahun 2018 telah mencapai Rp. 10.048.000 per kapita per tahun.

Grafik 2.1. IPM Kabupaten Purworejo dan Komponen, 2018

 $\mathsf{IPM} = 71.87$

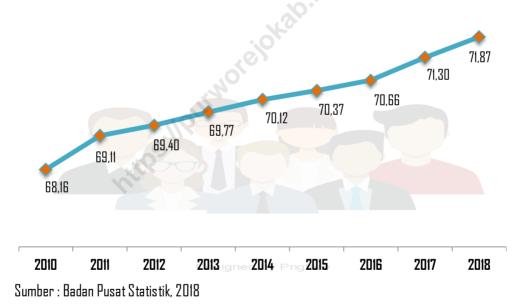
- Angka Harapan Hidup Saat Lahir = 74,4 Tahun
- Harapan Lama Sekolah = 13,48 Tahun
- Rata-rata Lama Sekolah = 7,70 Tahun
- Pengeluaran per Kapita per Tahun = Rp. 10.048.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018



Dari tahun ke tahun , IPM Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan. Bahkan semenjak tahun 2014, IPM Kabupaten Purworejo telah masuk dalam kategori tinggi yaitu pada angka diatas 70. Di tahun 2010, IPM Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 68,16. Selama kurun waktu delapan tahun terakhir, telah terjadi peningkatan IPM sebesar 3,71 poin. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, IPM pada tahun 2018 naik sekitar 0,57 poin. Semakin naiknya angka IPM ini menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Seiring dengan kenaikan IPM, dimensi yang membentuknya semakin mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan harapan bayi baru lahir untuk dapat hidup semakin lama, rata-rata lama sekolah maupun harapan mengenyam bangku pendidikan juga semakin lama, serta standar hidup penduduk Kabupaten Purworejo semakin membaik.

Grafik 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo, 2010-2018



Pertumbuhan IPM menunjukkan perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan yang positif mnegindikasikan kenaikan IPM yang artinya terjadi perbaikan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Pertumbuhan negative menunjukkan sebaliknya, terjadi penurunan kualitas pembangunan manusia yang harus dicermati. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa IPM Kabupaten Purworejo semakin meningkat dalam delapan tahun terakhir. Ini berarti pertumbuhan IPM pun menunjukkan angka yang positif. Dibanding tahun 2017, IPM di tahun 2018 tumbuh sebesar 0,80 persen. Selama tahun 2010 sampai 2018, pertumbuhan IPM yang paling



tinggi adalah pada periode tahun 2011 dibanding tahun 2010 yang tumbuh sebesar 0,95 poin. Sementara itu, pertumbuhan IPM yang paling rendah adalah pada periode tahun 2015 terhadap 2014 yang hanya tumbuh sebesar 0,25 poin.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik mengelompokkan status pembangunan manusia bedasarkan IPM menjadi 4 kelompok yaitu:

■ Sangat Tinggi : IPM ≥ 80

Tinggi : 70 ≤ IPM < 80
 Sedang : 60 ≤ IPM < 70

■ Rendah : IPM < 60

IPM terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjadikan status pembangunan manusia Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 masuk dalam kelompok "tinggi". Melihat capaian sejak tahun 2014 hingga 2018, peluang Kabupaten Purworejo untuk tetap berada dalam kategori tinggi pada tahuntahun mendatang sangat besar. Hal ini merupakan modal awal bagi pemerintah untuk semakin banyak memberikan program-program yang bertujuan meningkatkan pembangunan manusia melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Tingkat kesehatan Kabupaten Purworejo semakin meningkat

Dimensi pertama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir yaitu melalui angka harapan hidup (AHH). Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Sejak tahun 2010, angka harapan hidup seroang bayi saat lahir di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan harapan hidup bagi bayi yang baru lahir semakin besar karena membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.



74.40 74.26 74.14 74.03 73,83 73.77 73,66 73,56 73,45 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Grafik 2.3 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Purworejo, 2010-2018 (Tahun)

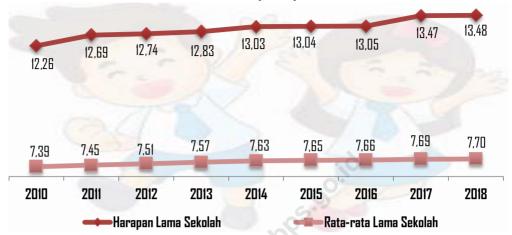
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Indikator pendidikan semakin tumbuh positif

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah hampir sama pergerakannya. Namun di tahun 2015 ke bawah, pertumbuhan angka harapan lama sekolah lebih cepat dibandingkan angka rata-rata lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.



Grafik 2.4 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purworejo, 2010-2018 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2010 hingga 2018. Secara rata-rata angka harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 1.20 persen per tahun selama tahun 2010-2018. Pertumbuhan yang paling tinggi adalah di tahun 2011 terhadao 2010 yang tumbuh sebesar 3.51 persen. Pada tahun 2018, pertumbuhan angka harapan lama sekolah tumbuh paling rendah terhadap tahun 2017 dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah hanya tumbuh sebesar 0.52 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Pertumbuhan paling tinggi adalah di tahun 2011 terhadap 2010 dan pertumbuhan paling rendah di tahun 2018 terhadap 2017.

Standar hidup layak yang semakin baik

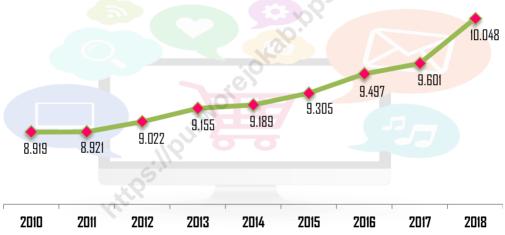
Standar hidup layak sebagai dimensi terakhir pembangun IPM diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk Kabupaten Purworejo sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 semakin meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan pengeluaran per kapita yang paling tinggi adalah tahun 2018 yang naik sekitar 4,66 persen dibanding tahun 2017. Pertumbuhan yang paling rendah adalah tahun 2011 yang hanya





tumbuh 0,02 persen dibanding tahun 2010. Secara rata-rata, pertumbuhan pengeluaran per kapita Kabupaten Purworejo tumbuh sekitar 1,51 persen selama delapan tahun terakhir. Di tahun 2018, pengeluaran per kapita per tahun penduduk di Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 10,05 juta rupiah. Jika diambil rata-rata per harinya, seorang penduduk mengeluarkan biaya sekitar 27 ribu rupiah untuk makan minum dan keperluan lainnya. Semakin meningkatnya pengeluaran, seorang penduduk dinilai semakin mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Melalui pendekatan pengeluaran inilah standar hidup atau kesejahteraan penduduk mampu diukur. Sebagai catatan pengeluaran perkapita di sini adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antardaerah (pengeluaran perkapita disesuaikan).

Grafik 2.5 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Purworejo, 2010-2018 (Ribu Rupiah/Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

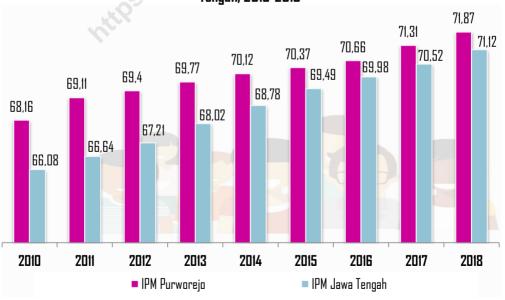




BAB 3 Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah diantara 34 kabupaten/kota lainnya. Letaknya berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo sejalan dengan pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah secara keseluruhan. Sejak tahun 2010, IPM Kabupaten Purworejo maupun IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Selama periode delapan tahun terakhir, capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo menduduki peringkat sekitar 13 hingga 14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meskipun dalam dua tahun terakhir IPM Provinsi Jawa Tengah sudah masuk dalam kategori "tinggi", namun IPM Kabupaten Purworejo selama periode yang sama selalu lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Tengah.

Grafik 3.1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2018



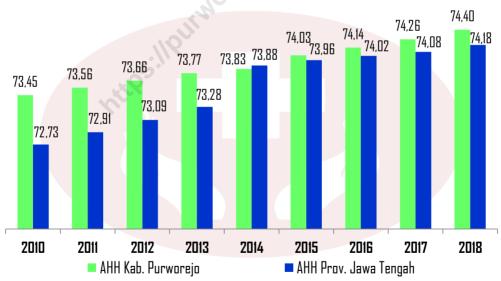
Sumber: Radan Pusat Statistik, 2018



IPM Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 telah mencapai 71,87 sementara IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,12. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Purworejo pada peringkat ke-14 diantaranya 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Jika nilai IPM Kabupaten Purworejo telah memasuki kategori tinggi sejak tahun 2014, IPM Provinsi Jawa Tengah baru tergolong kategori tinggi di tahun 2017. Di tahun 2018, IPM Kabupaten Purworejo lebih tinggi 0,75 poin dibanding IPM Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan dimensi pertama pembentuk IPM yaitu kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup bayi saat lahir juga sejalan dengan perkembangan IPM. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Purworejo selama tahun 2010 hingga 2018 hampir selalu lebih tinggi dibanding angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah. Hanya di tahun 2014 AHH Kabupaten Purworejo sedikit di bawah AHH Provinsi Jawa Tengah. Meskipun sama-sama mengalami kenaikan di tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya, AHH Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 74,40 atau lebih tinggi 0,22 poin dibandingkan AHH Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 3.2 Angka Harapan Hidup Bayi Saat Lahir Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2018 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik. 2018

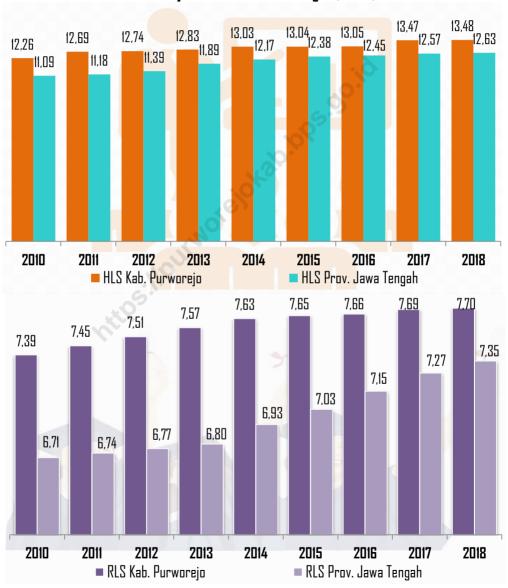
Dimensi kedua pembentuk IPM adalah pendidikan yang diukur melalui indikator angka harapan lama sekolah (HLS) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Pada dimensi pendidikan ini, ukuran di Kabupaten Purworejo baik untuk HLS maupun RLS selalu lebih tinggi dibanding Provinsi





Jawa Tengah. HLS Kabupaten Purworejo rata-rata tumbuh 1,20 persen dari tahun 2010 sampai 2018, sedangkan HLS Provinsi Jawa Tengah tumbuh lebih cepat dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 1,65 persen. RLS Provinsi Jawa Tengah juga tumbuh lebih cepat dibandingkan RLS Kabupaten Purworejo dalam selang waktu 2010 sampai 2018.

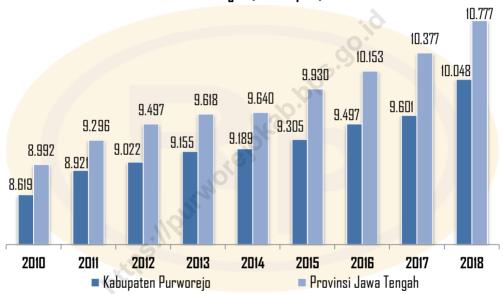
Grafik 3.3. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah (Tahun)





Dimensi terakhir pembentuk IPM adalah standar hidup layak yang dapat ditunjukkan melalui angka pengeluaran per kapita per tahun penduduk. Sejak tahun 2010 hingga 2018, rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibanding Kabupaten Purworejo. Di tahun 2018, pengeluaran per kapita per tahun secara rata-rata penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,78 juta rupiah, berbeda sekitar 700 ribu rupiah dengan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Purworejo.

Grafik 3.4. Pengeluaran per Kapita per Tahun Penduduk Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah (Ribu Rupiah)





Kesenjangan Pembangunan Manusia se-Eks Karesidenan Kedu

IPM Purworejo
peringkat 2

IPM naik dibanding 2017



Wonosobo memiliki IPM terendah

Kota Magelang memiliki IPM tertinggi





BAB 4

Kesenjangan Antarwilayah Eks Karesidenan Kedu

Kesenjangan Pembangunan Manusia

Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi. Dalam satu karesidenan terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Eks Karesidenan Kedu, yang meliputi Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang.

IPM Kabupaten Purworejo menempati peringkat kedua se-eks Karesidenan Kedu setelah Kota Magelang. Secara total Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Purworejo peringkat ke-14 sedangkan Kota Magelang peringkat ke-4. Sementara itu, Kabupaten Magelang peringkat ke-25, Kabupaten Temanggung peringkat ke-26, Kabupaten Kebumen peringkat ke-27, dan terakhir adalah Kabupaten Wonosobo yang merupakan peringkat ke-31 dari total 35 kabupaten/kota. Selisih IPM antara Kota Magelang (sebagai peringkat pertama se-eks Karesidenan Kedu) dengan Kabupaten Wonosobo (sebagai peringkat terakhir se-eks Karesidenan Kedu) adalah sebesar 10,50 poin.

Grafik 4.1. Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah, 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Perkembangan selisih IPM tertinggi dan terendah se-wilayah Eks Karesidenan Kedu dalam



kurun waktu delapan terakhir berada pada kisaran 10 hingga 11 poin. Selisih paling banyak terjadi di tahun 2010 dimana pada waktu itu selisih IPM dari daerah dengan IPM tertinggi dengan daerah dengan IPM terendah mencapai 11,49 poin. Selisih paling sedikit terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 10,50 poin.

Kesenjangan Kesehatan Manusia

Seperti pembahasan sebelumnya, dimensi kesehatan merupakan penjabaran dari angka harapan hidup bayi saat lahir yang menggunakan data jumlah anak lahir hidup dan anak masih hidup. Kota Magelang memiliki angka harapan hidup yang paling tinggi dibanding kabupaten lain di wilayah Eks Karesidenan Kedu dan Kabupaten Wonsobo adalah yang terendah. Selisih angka harapan hidup antara wilayah dengan AHH tertinggi dan AHH terendah adalah sebesar 5,36 poin di tahun 2017 dan 5,26 poin di tahun 2018.

6,02 5.94 5.86 5.78 5,74 5,56 5.46 5.36 5.26 **7**П1П **7**П11 2013 2014 2016 2012 2015 2017 2018

Grafik 4.2 Perkembangan Selisih Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah, 2010-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Melihat tren perkembangan selisih AHH kabupaten/kota Eks Karesidenan Kedua yang tertinggi dengan yang terendah dari tahun 2010 sampai dengan 2018 semakin mengecil. Artinya, perbedaan kualitas kesehatan dari daerah yang paling tinggi dengan paling rendah semakin berkurang. Perbaikan di bidang kesehatan semakin menjadi perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya. Pemerintah melalui program-program yang diberikan diharapkan mampu





secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Masyarakat pun demikian, dengan semakin terbukanya akses informasi baik melalui media elektronik maupun sosialisasi langsung oleh pemerintah diharapkan semakin teredukasi perihal menjaga dan berperilaku hidup sehat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat tersebut yang pada akhirnya mampu memperbaiki kualitas kesehatan wilayah kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu sehingga kesenjangan bidang kesehatan semakin mengecil dari tahun ke tahun.

Kesenjangan Pendidikan

Sejalan dengan perbaikan kualitas kesehatan, dalam kurun waktu 2010-2018, kualitas pendidikan di wilayah Eks Karesidenan Kedu juga menunjukkan perkembangan yang baik. Harapan lama sekolah penduduk 7 tahun semakin meningkat. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Angka harapan lama sekolah penduduk di kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kedu berkisar anatara 11 dan 13 tahun. Kota Magelang masih merupakan daerah dengan angka harapan lama sekolah (HLS) yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lain sedangkan Kabupaten Wonosobo yang paling rendah. Di tahun 2018, HLS Kota Magelang mencapai 13,80 tahun sementara Kabupaten Wonosobo adalah 11,69 tahun. Hal ini mengindikasikan penduduk usia 7 tahun ke atas di Kota Magelang berpotensi lebih lama mengenyam bangku pendidikan dibanding penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Wonosobo.

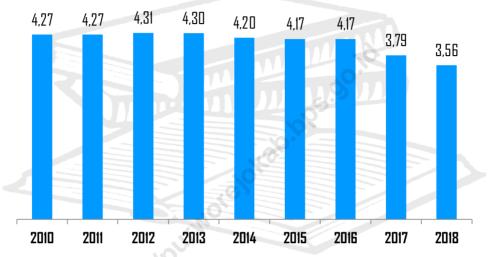
Grafik 4.3. Perkembangan Selisih Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah, 2010-2018





Kesenjangan angka HLS pada tahun 2010 merupakan yang tertinggi antara wilayah dengan nilai HLS tertinggi dengan yang memiliki nilai HLS terendah se-Eks Karesidenan Kedu. Kesenjangan ini sempat berkurang di tahun 2012 hingga2016 dimana selisihnya dalam kisaran 1 poin. Namun di tahun 2017 dan 2018 selisih ini kembali melebar.

Grafik 4.4. Perkembangan Selisih Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah, 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Perkembangan selisih angka rata-rata lama sekolah (RLS) untuk kota Magelang sebagai wilayah dengan RLS tertinggi se-Eks Karesidenan Kedu dengan Kabupaten Wonosobo sebagai wilayah dengan RLS terendah hampir sama setiap tahunnya. Hanya saja sejak tahun 2017 selisih ini semakin mengecil. Semenjak tahun 2010 selisih yang dihasilkan berada pada kisaran angka 4 poin, di tahun 2017 selisih tersebut telah mencapai pada angka di digit 3. Tahun 2018 selisih tersebut semakin mengecil dan mendekati angka 3,56 poin.

Seperti halnya kesenjangan angka harapan lama sekolah, kesenjangan rata-rata lama sekolah di Eks Karesidenan Kedu juga diakibatkan perbedaan capaian antara Kota Magelang dengan Kabupaten Wonosobo. Di tahun 2018, RLS Kota Magelang adalah sebesar 10,31 tahun sedangkan Kabupaten Wonosobo sebesar 6,75 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 10 tahun sementara secara rata-rata penduduk di Kabupaten Wonosobo selama hampir 7 tahun.



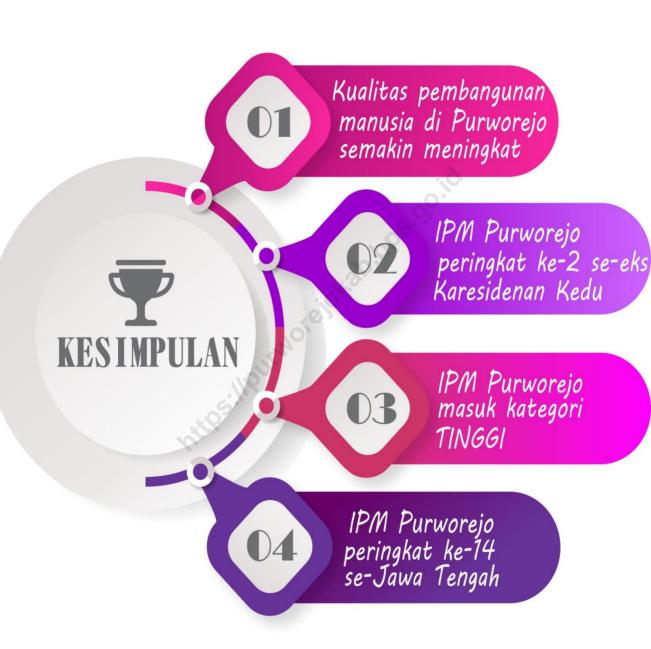
Kesenjangan Pengeluaran per Kapita

Indikator pengeluaran per kapita mewakili dimensi terakhir pembentuk IPM yaitu standar hidup layak. Besarnya pengeluaran untuk mencukupi kebutuhannya menjadi tolak ukur sejahtera atau tidaknya penduduk tersebut. Semakin besar biaya yang dikeluarkan penduduk, semakin terpenuhi pula kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Semakin terpenuhi kebutuhan hidup, semakin baik pula kualitas hidup penduduk tersebut. Tinggi rendahnya kebutuhan akan konsumsi penduduk tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang didiaminya.

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai 2018, pengeluaran per kapita penduduk di wilayah Eks Karesidenan Kedua semakin meningkat. Namun demikian, kesenjangan masih terjadi. Kesenjangan ini ditunjukkan dengan selisih antara wilayah dengan rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi dengan terendah. Kota Magelang masih menjadi wilayah dengan indikator IPM tertinggi khususnya untuk dimensi standar hidup layak yang ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita per tahun sebesar 11,99 juta rupiah di tahun 2018. Sementara itu Kabupaten Kebumen tercatat sebagai wilayah dengan pengeluaran per kapita per tahun terendah yaitu sebesar 8,76 juta rupiah.

Grafik 4.5. Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu yang Tertinggi dengan Terendah, 2010-2018 (Juta Rupiah)









BAB 5

Kesimpulan

Dari hasil pengamatan data dan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo tahun 2018, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

- Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo sejak tahun 2010 hingga 2018.
- 2. Meningkatnya IPM Kabupaten Purworejo juga diikuti dengan peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM yaitu sebagai berikut:
 - a. Angka Harapan Hidup (AHH) di tahun 2018 tumbuh 0,19 persen yaitu sebesar 74,40 tahun dibanding tahun 2017 yaitu 74,26 tahun.
 - b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di tahun 2018 tumbuh 0,07 persen yaitu sebesar 13,48 tahun dibanding tahun 2017 yaitu 13,47 tahun.
 - c. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di tahun 2018 tumbuh 0,13 persen yaitu sebesar 7,70 tahun dibanding tahun 2017 yaitu 7,69 tahun.
 - d. Pengeluaran per kapita per tahun di tahun 2018 tumbuh 4,66 persen yaitu sebesar 10,05 juta rupiah dibanding tahun 2017 yaitu 9,60 juta rupiah.
- IPM Kabupaten Purworejo tahun 2018 adalah 71,87 dan merupakan yang tertinggi setelah Kota Magelang se-Eks Karesidenan Kedu.
- 4. IPM Kabupaten Purworejo telah masuk dalam kategori "tinggi".
- Capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo tahun 2018 menduduki peringkat 14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- IPM Provinsi Jawa Tengah baru memasuki kategori tinggi di tahun 2017 sementara untuk Kabupaten Purworejo sudah sejak tahun 2014,

LAMPIRAN LAMPIRAN



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen Pembentuknya Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2017-2018

Kode	Kabupaten/Kota	АНН		HLS		RLS		Pengeluaran per Kapita		IPM	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3300	JAWA TENGAH	74,08	74,18	12,57	12,63	7,27	7,35	10.377	10.777	70,52	71,12
3301	Cilacap	73,24	73,39	12,30	12,48	6,91	6,92	9.896	10.274	68,90	69,56
3302	Banyumas	73,33	73,45	12,63	12,64	7,40	7,41	10.713	11.240	70,75	71,30
3303	Purbalingga	72,91	72,98	11,94	11,95	6,87	7,00	9.340	9.786	67,72	68,41
3304	Banjarnegara	73,79	73,91	11,41	11,42	6,27	6,28	8.630	9.160	65,86	66,54
3305	Kebumen	72,98	73,11	12,90	12,91	7,29	7,34	8.446	8.757	68,29	68,80
3306	Purworejo	74,26	74,40	13,47	13,48	7,69	7,70	9.601	10.048	71,31	71,87
3307	Wanasaba	71,30	71,46	11,68	11,69	6,51	6,75	9.969	10.503	66,89	67,81
3308	Magelang	73,39	73,47	12,47	12,48	7,41	7,57	8.627	9.025	68,39	69,11
3309	Boyolali	75,72	75,79	12,15	12,16	7,44	7,55	12.262	12.758	72,64	73,22
3310	Klaten	76,62	76,67	12,97	13,13	8,23	8,24	11.369	11.738	74,25	74,79
3311	Sukoharjo	77,49	77,54	13,80	13,81	8,71	8,84	10.765	11.100	75,56	76,07
3312	Wonogiri	76,00	76,05	12,44	12,45	6,68	6,88	8.765	9.117	68,66	69,37
3313	Karanganyar	77,31	77,36	13,65	13,66	8,50	8,51	10.933	11.223	75,22	75,54
3314	Sragen	75,55	75,60	12,64	12,65	7,04	7,22	12.041	12.391	72,40	72,96
3315	Grobogan	74,46	74,55	12,27	12,28	6,66	6,67	9.716	10.097	68,87	69,32
3316	Blora	73,99	74,12	12,13	12,14	6,45	6,46	9.065	9.385	67,52	67,95
3317	Rembang	74,32	74,39	12,04	12,05	6,94	6,95	9.736	10.191	68,95	69,46
3318	Pati	75,80	75,93	12,29	12,30	7,08	7,18	9.813	10.190	70,12	70,71
3319	Kudus	76,44	76,47	13,20	13,21	8,31	8,62	10.639	10.979	73,84	74,58
3320	Jepara	75,68	75,71	12,70	12,71	7,33	7,43	9.745	10.169	70,79	71,38
3321	Demak	75,27	75,29	12,54	12,86	7,47	7,48	9.544	10.001	70,41	71,26
3322	Semarang	75,57	75,62	12,84	12,85	7,87	7,88	11.389	11.807	73,20	73,61
3323	Temanggung	75,42	75,47	12,07	12,08	6,90	6,94	8.794	9.142	68,34	68,83
3324	Kendal	74,24	74,30	12,69	12,70	6,85	7,05	10.863	11.257	70,62	71,28
3325	Batang	74,50	74,56	11,87	11,88	6,61	6,62	8.805	9.203	67,35	67,86
3326	Pekalongan	73,46	73,53	12,16	12,17	6,73	6,74	9.702	10.221	68,40	68,97
3327	Pemalang	72,98	73,11	11,88	11,91	6,31	6,32	7.785	8.186	65,04	65,67
3328	Tegal	71,14	71,28	12,06	12,34	6,55	6,70	9.136	9.433	66,44	67,33
3329	Brebes	68,61	68,84	11,69	12,02	6,18	6,19	9.554	9.890	64,86	65,68
3371	Kota Magelang	76,66	76,72	13,79	13,80	10,30	10,31	11.525	11.994	77,84	78,31
3372	Kota Surakarta	77,06	77,11	14,51	14,52	10,38	10,53	13.986	14.528	80,85	81,46
3373	Kota Salatiga	76,98	77,11	14,99	15,00	10,15	10,40	14.921	15.464	81,68	82,41
3374	Kota Semarang	77,21	77,23	15,20	15,50	10,50	10,51	14.334	14.895	82,01	82,72
3375	Kota Pekalongan	74,19	74,25	12,78	12,79	8,56	8,57	11.800	12.312	73,77	74,24
3376	Kota Tegal	74,23	74,30	12,89	12,90	8,29	8,30	12.283	12.830	73,95	74,44





Lampiran 2. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras Pisang lainnya Rokok kretek tanpa filter Tepung terigu Pepaya Rokok putih Ketela Minyak kelapa Rumah sendiri/bebas sewa Kentang Minyak goreng lainnya Rumah kontrak Tongkol/tuna/ Kelapa Rumah sewa Kembung Gula pasir Rumah dinas Bandeng Teh Listrik Mujair Kopi Air PAM Mas Garam LPG Lele Kecap Minyak tanah Ikan segar Penyedap Lainnya(batu Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-oado/ketoprak Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Ketela Minyak kelapa Rumah sendiri/bebas sewa Kentang Minyak goreng lainnya Rumah kontrak Tongkol/tuna/ Kelapa Rumah sewa Kembung Gula pasir Rumah dinas Bandeng Teh Listrik Mujair Kopi Air PAM Mas Garam LPG Lele Kecap Minyak tanah Ikan segar Penyedap Lainnya(batu Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Kentang Minyak goreng lainnya Rumah kontrak Tongkol/tuna/ Kelapa Rumah sewa Kembung Gula pasir Rumah dinas Bandeng Teh Listrik Mujair Kopi Air PAM Mas Garam LPG Lele Kecap Minyak tanah Ikan segar Penyedap Lainnya(batu Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Tongkol/tuna/ Kelapa Rumah sewa Kembung Gula pasir Rumah dinas Bandeng Teh Listrik Mujair Kopi Air PAM Mas Garam LPG Lele Kecap Minyak tanah Ikan segar Penyedap Lainnya(batu Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Susu bubuk Nasi campur/rames Praktek dokter/poliklinik
Kembung Gula pasir Rumah dinas Bandeng Teh Listrik Mujair Kopi Air PAM Mas Garam LPG Lele Kecap Minyak tanah Ikan segar Penyedap Lainnya(batu Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Biava RS Swasta Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Mujair Kopi Air PAM Mas Garam LPG Lele Kecap Minyak tanah Ikan segar Penyedap Lainnya(batu Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Mas Garam LPG Lele Kecap Minyak tanah Ikan segar Penyedap Lainnya(batu Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Lele Kecap Minyak tanah Ikan segar Penyedap Lainnya(batu Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Ikan segar Penyedap Lainnya(batu Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Biava RS Swasta Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Daging sapi Mie instan Perlengkapan mandi Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Biava RS Swasta Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Daging ayam Roti manis/roti Barang kecantikan Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Biava RS Swasta Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Daging ayam Kue kering Perawatan Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Biava RS Swasta Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Telur ayam ras Kue basah Sabun cuci Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Biava RS Swasta Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Susu kental Makanan gorengan Biaya RS Pemerintah Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Biava RS Swasta Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Susu bubuk Gado-qado/ketoprak Biava RS Swasta Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Susu bubuk Nasi campur/rames Puskesmas/pustu Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Bayam Nasi goreng Praktek dokter/poliklinik
Kangkung Nasi putih SPP
Kacang Lontong/ketupat Bensin
Bawang merah Soto/gule/sop/rawon Transportasi/pengangkutan
Bawang putih Sate/tongseng Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah Mie bakso/mie Pakaian jadi laki-laki
Cabe rawit Makanan ringan anak Pakaian jadi perempuan
Tahu Ikang (goreng/bakar Pakaian jadi anak-anak
Tempe Ayam/daging (goreng Alas kaki
Jeruk Makanan jadi lainnya Minyak Pelumas
Mangga Air kemasan galon Meubelair
Salak Minuman jadi lainnya Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon Es lainnya Perlengkapan perabot
Pisang raja Roko kretek filter Alat-alat Dapur/Makan



Lampiran 3. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara - Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025





DATA MENCERDASKAN BANGSA





Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Jalan Pangeran P. Joyokusumo, Banyuurip, Purworejo 54171 website: purworejokab.bps.go.id, email : bps3306@bps.go.id.

Telp (0275) 321218

